

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu ini sangat diperlukan guna membantu peneliti untuk memberi gambaran terhadap masalah yang akan dibahas. Karena minimnya penelitian mengenai pemberdayaan ekonomi melalui BMT, peneliti meninjau beberapa penelitian mengenai pemberdayaan ekonomi yang dijalankan oleh beberapa lembaga atau instansi lainnya, seperti lembaga keagamaan, masjid, desa wisata, BAZNAS dan lain sebagainya.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

| No. | Nama, Tahun, dan Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Perbedaan |
|-----|---|--|---|
| 1. | Azis Muslim. 2016. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Yayasan Perjuangan Wahidiyah. (Jurnal) | Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Wahidiyah dilaksanakan melalui koperasi yang selain menjadi tempat peminjaman modal juga menjadi wadah pembangun solidaritas antar anggota. | Teori pemberdayaan ekonomi yang digunakan adalah teori Wrihatnolo. Teori menjelaskan pemberdayaan dimulai dari penyadaran (membangun mental spiritual), <i>capacity building</i> (pemberian pelatihan), dan pemberian daya (bantuan modal dan pemasaran). |
| 2. | Asep Suryanto dan Asep Saepulloh. | Model pemberdayaan ekonomi yang masjid | Metode penelitian yang dipakai adalah <i>grounded</i> |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | 2016. Optimalisasi Fungsi dan Potensi Masjid : Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Kota Tasikmalaya. (Jurnal) | lakukan adalah model terintegrasi antara lembaga ZIS, keuangan mikro Islam dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. | <i>research</i> karena tujuan penelitian adalah merumuskan model pemberdayaan ekonomi masjid di Kota Tasikmalaya. |
| 3. | Muhammad Nizar. 2016. Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) di Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso Malang. (Jurnal) | Model pemberdayaan di BAZ Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso terdapat dua model : model distribusi konsumtif yang pemanfaatannya langsung sehingga tidak menimbulkan pengaruh secara ekonomi dan model distribusi produktif dengan sekedar pemberian modal usaha. | Model pemberdayaan ekonomi di BAZ Masjid Besar Syarif Hidayatullah di landasankan pada teori Amiruddin Inoed yang membahas golongan pemanfaatan zakat dalam buku <i>Anatomi Fiqh Zakat (Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan)</i> . |
| 4. | Pradono Pradono, Budi Faisal, Yani Adriani, R. Rikeu, dan R. Fajriasanti. 2016. <i>Toward Model of Community</i> | Pemberdayaan ekonomi melalui turis di Indonesia menjadi salah satu solusi dengan memanfaatkan turis sebagai sumber permasalahan sosial dan | Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus serta melakukan <i>assessment methods</i> dengan literature dan analisis |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | <i>Economic Empowerment Through Tourism Activities in Bogor Regency, West Java, Indonesia.</i> (Jurnal). | ekonomi. Dengan melakukan pemetaan potensi ekonomi dan penyesuaian dengan karakteristik masyarakat puncak menjadi cara dalam mengoptimalisasi pemberdayaan ekonomi. | komparatif. |
| 5. | Yasushi Suzuki, Sigit Pramono, dan Rufidah. 2016. <i>Islamic Microfinance and Poverty Alleviation Program: Preliminary Research Finding From Indonesia.</i> (Jurnal) | Untuk mengurangi kemiskinan melalui pendekatan yang diusulkan oleh Bigg dan Satterthwaite (2005) adalah dengan cara penguatan organisasi lokal dan pengembang masyarakat seperti keuangan mikro syariah harus terlibat dalam kemitraan strategis dengan masjid-masjid dan lembaga-lembaga sosial lainnya. | Penelitian menggunakan teori pendekatan yang diusulkan oleh Bigg dan Satterthwaite tahun 2005. |
| 6. | Kholidah Attina Yopa. 2017. Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Desa Wisata Budaya di | Model pemberdayaan yang digunakan oleh Desa Wisata Budaya Kebondalemkidul adalah pendekatan <i>bottom up</i> melalui pendampingan dan | Salah satu faktor pendukung dari keberhasilan pemberdayaan ekonomi Desa Wisata adalah bantuan dana dari PT. Taman Wisata Candi, |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | Kebondalemkidul, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. (Skripsi) | sosialisasi dengan membangun kesadaran ekonomi masyarakat terlebih dahulu kemudian memberikan pendayaan seperti modal kepada masyarakat. | UNESCO, dan beberapa lembaga lain yang turut membantu serta memiliki letak yang strategis dan didukung dengan adanya potensi wisata Candi Sojiwan. |
| 7. | Umiyati. 2017. <i>Local Economics Empowerment and Sharia Microfinance in Rural Community Perception.</i> (Jurnal) | Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat pedesaan terhadap produk dan layanan lembaga keuangan mikro syariah mempengaruhi persepsi masyarakat pedesaan terhadap lembaga keuangan mikro syariah dalam pemberdayaan ekonomi lokal. | Data dikumpulkan melalui survei dan kuesioner yang kemudian dianalisis dengan regresi linier berganda. |
| 8. | Abul Hassan, Shamim Saleem, 2017, <i>An Islamic microfinance business model in Bangladesh: its role in alleviation of poverty and</i> | Peningkatan pendapatan dan sumber daya memiliki peran penting dalam meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan dan rasa percaya diri. Penting untuk keuangan mikro | Metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi dan melakukan korelasi dengan <i>cross sectional data</i> . |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| | <i>socio-economic well-being of women.</i> (Jurnal) | Islam untuk terlibat dalam kegiatan membangun yang akan mendorong kesejahteraan penerima dalam jangka panjang. | |
| 9. | Masona. 2018. Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pendekatan Kelompok di Dusun Dwidarma Desa Negara Ratu Kec. Natar Kab. Lampung Selatan. (Skripsi) | Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan melalui kelompok budidaya ikan lele menunjukkan hasil yang baik terlihat dari setiap panen tiga bulan sekali menunjukkan peningkatan pendapatan. | Kegiatan pemberdayaan ekonomi berlandaskan pada teori Isbandi Rukminto Adi serta melalui pendekatan kelompok menurut Sjafari Agus, Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato. |
| 10. | Sukma Indra. 2018. <i>Economic Empowerment Model for the Poor Through Zakat Institution under Maqashid Syariah Concept in West Kalimantan.</i> (Jurnal) | Setelah melalui <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) untuk merumuskan <i>Maqashid</i> Syariah sebagai dasar pemberdayaan ekonomi melalui BAZNAS Kalimantan Barat. | Dalam penelitiannya, digunakan FGD untuk merumuskan model pemberdayaan di BAZNAS Kalimantan Selatan dengan berlandaskan kepada <i>Maqashid</i> Syariah. |

Dari table 2.1 di atas, perbedaan yang dimiliki oleh penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang ditinjau dari beberapa lembaga di atas

adalah penelitian dilakukan pada lembaga keuangan mikro syariah, yaitu BMT dengan fokus penelitian pada model pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan oleh tiga BMT di Yogyakarta.

B. Landasan Teori

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Konsep pemberdayaan yang ditulis oleh Pranarka dikutip oleh Mardi Yatmo dalam seminar yang diselenggarakan Bappenas menjelaskan, pemberdayaan dibangun dari adanya pemusatan kekuasaan faktor produksi. Kekuasaan ini dipengaruhi oleh sistem pengetahuan, politik, hukum dan ideologi yang bersifat manipulatif sehingga menciptakan adanya kelompok yang berkuasa dan yang dikuasai. Pemberdayaan diperlukan untuk mengatasi keadaan menguasai dan dikuasai tersebut (Hutomo, 2000).

Menurut Karl Marx, pemberdayaan masyarakat adalah proses perjuangan kaum *powerless* untuk memperoleh *surplus values* sebagai hak normatifnya. Untuk mendapatkan *surplus values* harus melalui penguasaan faktor-faktor produksi. Karena faktor-faktor produksi yang tidak dapat dikuasai oleh masyarakat lemah membuat mereka mengalami ketidakberdayaan sehingga perlunya pemberdayaan untuk memberikan ruang kepada mereka dalam berbagi kuasa dengan masyarakat yang kuat.

Tujuan dari pemberdayaan adalah untuk memberantas kemiskinan. Paradigma pemberdayaan adalah untuk mengubah keadaan dengan

memberi kesempatan kepada masyarakat miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang juga mereka pilih sendiri. Masyarakat juga dapat mengelola dana baik dari pemerintah atau pihak lain. Terdapat dua model pemberdayaan, yaitu:

a. Model pemberdayaan versi Paul Freire.

Model ini juga bisa disebut sebagai metodologi *conscientization*, yaitu proses belajar dengan melihat konflik sosial, ekonomi, dan politik pada suatu masyarakat yang kemudian disusun cara untuk menghilangkan kondisi yang menindas masyarakat.

b. Model pemberdayaan versi Schumacher.

Schumacher berpendapat bahwa manusia dapat membangun dirinya sendiri tanpa harus terlebih dahulu menghilangkan masalah struktural yang ada pada masyarakat. Menurut Schumacher strategi yang paling tepat untuk menolong rakyat miskin adalah dengan memberikan mereka kail bukan ikan agar mereka dapat mandiri.

Untuk pemberdayaan versi Paulo Freire, akan sulit diaplikasikan apabila pemberdayaan tersebut dihadapkan pada kepentingan-kepentingan yang dominan dalam suatu masyarakat. Para kaum elite pasti akan menolak pemberdayaan versi ini karena keradikalannya. Sedangkan versi Schumacher, tidak akan banyak membawa perubahan tanpa ada dukungan politik.

Pemberdayaan tidak akan berhasil jika kelompok masyarakat tidak diizinkan untuk mendirikan organisasi yang dibentuk oleh mereka dan untuk mereka. Hal yang sangat penting dalam memberdayakan masyarakat adalah dengan mengetahui kesulitan-kesulitan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi model pemberdayaan harus sadar bahwa model ini memfokuskan pada transformasi hubungan antara kekuatan sosial, politik, dan ekonomi dalam suatu negara. Model ini juga tidak akan berjalan jika tidak didukung oleh suatu sistem peradilan yang mandiri (Abimanyu, dkk. 1997: 139-143). Sudah ada Undang-Undang yang mengatur tentang pemberdayaan usaha kecil dan desa. Dalam penjelasan Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 menyatakan bahwa pemberdayaan usaha kecil dilaksanakan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Kemudian di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dalam Pasal 26 Ayat 1, kepala desa bertugas untuk melaksanakan pembangunan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Terdapat berbagai macam pemberdayaan, mulai dari bidang kesehatan, sosial, wisata, pertanian, pendidikan, ekonomi, dll. Untuk pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dapat dilakukan dengan penguatan masyarakat dalam memperoleh gaji yang layak. Karena salah satu tujuan dari pemberdayaan ekonomi adalah bertambahnya pendapatan masyarakat lemah. Selain dari gaji, pendapatan dapat berasal dari keuntungan usaha. Dengan rendahnya tingkat pendidikan,

kurangnya keterampilan dan informasi, dan sifat mental yang lembek membuat tingkat pendapatan masyarakat lemah rendah.

Dari pandangan di atas didapatkan bahwa pemberdayaan ekonomi merupakan penguatan masyarakat dalam pemilikan faktor-faktor produksi, untuk mendapatkan gaji yang memadai, memperoleh pengetahuan, informasi dan ketrampilan yang perlu dilakukan baik dari aspek kebijakan atau masyarakatnya itu sendiri (Guntur, 2009: 6).

Untuk mengatasi hal tersebut, dalam pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa kegiatan, yaitu :

1. Memberikan kemudahan akses bantuan modal usaha. Modal yang diberikan dalam bentuk pinjaman, sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap pengembalian modal. Karena inti dari pemberdayaan itu sendiri adalah kemandirian bukan ketergantungan.
2. Adanya layanan pengembangan SDM. Bisa melalui pelatihan dan pendampingan untuk memfasilitasi proses belajar dan monitoring.
3. Kemudahan akses sarana dan prasarana yang turut serta mendukung ekonomi masyarakat lokal. Ketika sarana dan prasarana seperti pemasaran, produksi, atau transportasi terpenuhi dapat meningkatkan produktivitas jalannya usaha.

Secara umum, kegiatan pemberdayaan ekonomi berdasarkan kepada yang dibahas oleh M. Guntur Effendi memiliki dimensi pendekatan, seperti berikut:

1. Bantuan modal

Bantuan modal menjadi faktor yang penting untuk masyarakat tuna daya. Lambatnya akumulasi modal pada pengusaha mikro, kecil, dan menengah, menjadi salah satu penyebab lesunya laju perkembangan usaha. Pemberian bantuan modal langsung dengan cara hibah, kurang mampu mendidik masyarakat untuk bertanggung jawab dengan dirinya sendiri.

Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan permodalan adalah dengan menjamin kredit kepada lembaga keuangan yang ada. Hal ini dapat membuat masyarakat lebih bertanggung jawab terhadap pengembalian modal dan bisa membiasakan diri dalam berkerjasama dengan lembaga keuangan yang ada (Guntur, 2009: 10-11).

2. Bantuan pembangunan prasarana

Aspek penting dalam usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah dengan pembangunan prasarana produksi dan pemasaran. Pembangunan prasarana produksi akan menjadi kurang efektif untuk mendorong tumbuh dan produktivitasnya usaha tanpa disertai dengan adanya pemasaran. Karena pemasaran membantu dalam peningkatan pendapatan para pengusaha (Guntur, 2009:12).

3. Penguatan kelembagaan

Pada awalnya pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan pendekatan individual. Karena hasil pendekatan individual kurang memuaskan, maka dilakukan pendekatan kelompok. Kemudian dalam pengelompokannya diarahkan pada kemudahan untuk memperoleh akses modal ke lembaga keuangan yang ada, membangun skala usaha yang ekonomis, dan membangun kemitraan antar skala usaha dan jenis usaha (Guntur, 2009 : 12-13).

4. Penguatan kemitraan usaha

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah penguatan bersama, antara yang besar hanya akan berkembang dengan adanya yang kecil dan menengah, ataupun sebaliknya. Karena pemberdayaan itu sendiri berarti *give power to everybody*. Daya saing yang tinggi akan ada ketika antara kelompok yang besar dengan yang menengah atau kecil terjadi keterkaitan. Keterkaitan ini bisa terjadi melalui kemitraan dalam proses produksi, permodalan, sampai dengan distribusi, hingga masing-masing kelompok dapat diperdayakan (Guntur, 2009 : 13).

5. Bantuan pendampingan

Tugas utama pendamping adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan antara usaha mikro, usaha menengah maupun usaha

besar. Untuk menjamin keberlanjutan dari hasil usaha pendampingan adalah dengan melibatkan pendamping dari internal bukan eksternal yang bersifat sementara. (Guntur, 2009 : 12).

2. *Baitul Maal Wattamwil*

Baitul maal wattamwil merupakan lembaga keuangan syariah yang berorientasi pada kegiatan ekonomi berskala mikro. Menurut Soemitra (2010: 451-452) terdapat dua istilah yang merupakan fungsi dari *Baitul Maal Wattamwil* (BMT), yaitu:

1. *Baitul maal* atau rumah harta: Menerima dan mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah secara amanah.
2. *Baitul tanwil* atau rumah pengembangan harta: Melakukan investasi dan pengembangan usaha produktif dalam meningkatkan ekonomi pengusaha mikro atau mikro.

Dari dua istilah di atas dapat disimpulkan BMT merupakan lembaga penyalur pendayagunaan dana ibadah (zakat, infak, sedekah dan wakaf) yang juga dapat bergerak dalam kegiatan investasi produktif. Secara umum fungsi BMT adalah mengidentifikasi, mengorganisir dan mengembangkan potensi SDM serta kemampuan ekonomi. Menurut Sudarsono (2013: 108-109) BMT memiliki peran untuk:

- a. Mencegah praktek ekonomi *non* syariah dari masyarakat.
- b. Melepaskan ketergantungan masyarakat terhadap rentenir.
- c. Memberikan pendanaan dan pembinaan usaha kecil.

- d. Melindungi keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

Konsep dari *Baitul Maal* sudah muncul pada zaman Rasulullah. *Baitul Maal* atau rumah harta merupakan tempat pengumpulan harta milik negara. Harta yang sudah dikumpulkan tersebut kemudian dibelanjakan untuk kebutuhan negara dan dengan batas tertentu pemimpin dan para pejabat dapat menggunakan harta tersebut untuk mencukupi kehidupan pribadinya. Pada zaman pemerintahan Rasulullah, Masjid Nabawi digunakan untuk kantor pusat negara dan untuk menyimpan harta pendapatan negara (Karim, 2016: 52-53).

Rasulullah Saw. memberikan dua kebijakan untuk menumbuhkan kegiatan ekonomi pada era permulaan Islam. Kebijakan pertama adalah dengan mendorong masyarakat memulai aktivitas ekonomi baik individu ataupun berkelompok tanpa dibiayai *Baitul Maal*. Yang kedua adalah dengan bantuan dana *Baitul Maal*. Pendapatan *Baitul Maal* itu sendiri pada zaman Rasulullah Saw. dan pada pemerintahan *al-Khulafa al-Rasyidun* terbagi atas *kharaj* (dari sewa tanah pertanian dan hutan), zakat, *khums* (hasil usaha atau hasil rampasan perang), *Jizyah* (pajak bagi *non-muslim*), dan *kafarat* (denda dari pelanggaran seorang muslim). Kemudian dana *Baitul Maal* dikeluarkan untuk penyebaran ajaran Islam, gerakan pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, pembangunan armada perang dan keamanan, dan pemberian layanan kesejahteraan sosial (Karim, 2016: 105-147).

BMT memiliki dua aktivitas, aktivitas sosial dan aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi dalam ajaran Islam tidak lepas dari yang namanya syariat Islam. Dengan demikian tujuan ekonomi syariah adalah tujuan syariat Islam, yaitu untuk kesejahteraan manusia, terciptanya kebahagiaan dunia akhirat, dan bangkitnya kualitas kehidupan yang baik, melalui peningkatan kualitas atau disebut dengan *maqashid syariah*, yaitu:

1. Keyakinan atau *faith*.
2. Kehidupan atau *life*.
3. Kecerdasan atau *intellect*.
4. Keturunan atau *posterity*.
5. Kekayaan atau *wealth* (Supadie, 2013: 15).

Secara umum, semua BMT memiliki visi dan misi yang sama, yaitu mewujudkan lembaga yang professional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah. Ibadah yang dipahami dalam arti luas, yakni tidak hanya mencakup soal aspek peribadatan, tetapi juga mencakup segala aspek kehidupan. Jadi untuk setiap kegiatannya, BMT harus berorientasi pada upaya mewujudkan ekonomi yang adil dan mensejahterakan.

Misi dari BMT adalah untuk membangun tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil serta berkemajuan dengan berlandaskan syari'ah dan ridha Allah SWT. Dari misi tersebut dapat disimpulkan bahwa BMT tidak semata-mata beroperasi hanya untuk mencari keuntungan dan penumpukan modal pada golongan orang kaya,

tetapi juga fokus pada pendistribusian laba yang adil dan merata sesuai prinsip Islam.

Tujuan dari didirikannya BMT adalah untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat khususnya dalam meningkatkan kualitas perekonomiannya. Hal ini dilihat dari upaya BMT dalam memperdaya anggotanya agar dapat mandiri. Salah satunya dengan pemberian modal. Setelah anggota diberikan modal pinjaman, BMT harus mendampingi untuk meminimalisir penyimpangan yang mungkin terjadi ketika modal itu digunakan (Ridwan, 2006: 3-5).

BMT hadir untuk mendorong masyarakat ekonomi kelas bawah-mikro untuk dapat berpartisipasi dalam simpanan meminjam dengan prinsip syariah. BMT juga berperan untuk menjembatani antara masyarakat yang berkecukupan dengan masyarakat miskin. Ketika masyarakat yang berkecukupan membantu dengan dana yang dimilikinya, masyarakat yang miskin didorong untuk bertanggung jawab terhadap pinjaman dana yang dipinjamnya untuk mengembangkan usahanya. Hal ini memungkinkan masyarakat sangat memiliki pengaruh terhadap maju atau mundurnya BMT. Terdapat ciri khusus yang dimiliki oleh BMT, yaitu:

1. Pegawai dan Staf BMT berkerja secara aktif-proaktif dengan sistem menjemput bola baik untuk menghimpun dana anggota maupun untuk pembiayaan. Sehingga pembicaraan bisnis dapat dilakukan di luar kantor.

2. Melakukan pendampingan usaha anggota. Pendampingan yang dilakukan lebih efektif jika dilakukan secara berkelompok. Pendampingan ini dilakukan dengan pengajian rutin baik di rumah maupun di masjid. Dalam pengajian ini juga dilakukan angsuran dan simpanan (Ridwan, 2006: 10).

Dalam operasionalnya BMT dapat menjalankan jenis usaha keuangan maupun non-keuangan. Untuk jenis usaha keuangan BMT berbentuk simpanan dan pembiayaan. Dana zakat, infak, dan sedekah disimpan dengan akad *wadiah yad al-amanah*. Sedangkan kegiatan usaha non-keuangan bisa berupa pengembangan di sektor riil, seperti kios telepon, memperkenalkan teknologi maju, mendorong tumbuhnya industri rumah tangga serta usaha lain yang layak dengan dikelola dengan sistem manajemen yang terpisah dan profesional (Soemitra, 2010: 464).

3. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun *non* makanan yang diukur dari pengeluaran (BPS, 2016).

Berdasarkan penyebabnya, kemiskinan dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Kemiskinan struktural

Merupakan kemiskinan yang disebabkan karena akibat dari tidakberdayanya seseorang atau kelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, sehingga

mereka tidak memiliki akses untuk berkembang dan membebaskan diri dari kemiskinan atau bisa dikatakan “seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin”.

b. Kemiskinan kultural

Merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor adat atau budaya suatu daerah yang membatasi seseorang atau sekelompok masyarakat sehingga membuat mereka tetap miskin.

Kemiskinan tidak hanya dari bidang ekonomi saja, tapi meluas hingga ke sosial, politik, pendidikan, dan kesehatan. Pada dasarnya arti kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:

1) Kemiskinan relatif

Kemiskinan yang diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan pokok seseorang untuk dapat hidup secara layak. Seperti terpenuhinya makanan, pakaian, dan rumah.

2) Kemiskinan absolut

Kemiskinan yang dilihat dari aspek ketimpangan sosial. Seseorang sudah dapat memenuhi kebutuhan pokok minimumnya namun masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan orang dilingkungannya. Kemiskinan relatif sangat berkaitan dengan masalah distribusi pendapatan. Hal ini terlihat ketika semakin tinggi ketimpangan tingkat

kehidupan antara golongan atas dan bawah, maka semakin tinggi juga jumlah penduduk yang dikategorikan miskin.

Menurut Jhingan yang dikutip oleh Bappeda DIY, kemiskinan yang terjadi di negara berkembang dapat disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu :

- a. Prasarana dan sarana pendidikan yang tidak memadai.
- b. Pola konsumsi dan sarana kesehatan yang tidak layak.
- c. Penduduk yang bekerja sebagai tani atau pertambangan menggunakan teknologi yang kuno. (Bappeda, 2017)

Definisi miskin dalam Islam menurut sebagian ulama adalah orang tidak memiliki apapun, namun sebagiannya lagi mengatakan miskin adalah orang yang dapat mencukupi dirinya sendiri tapi belum untuk kebutuhan keluarganya. Berikut pengertian miskin menurut beberapa mazhab :

- a. Mazhab Hanafi

Dalam buku *al-Mabsut*, Sarakhsi ulama mazhab Hanafi menyatakan bahwa orang miskin adalah orang yang memintaminta dan tidak mempunyai apapun.

- b. Mazhab Maliki

Miskin merupakan status seseorang yang tidak mempunyai apapun. Beliau memiliki pengertian yang sama dengan dengan mazhab Hanafi.

- c. Mazhab Syafi'i dan Hanbali

Miskin menurut dua mazhab ini adalah orang yang dapat memenuhi kebutuhannya namun masih belum tercukupi. (Baitul Mal Aceh, 2016)

Di Islam, orang yang terkategori miskin berhak mendapatkan manfaat dari zakat. Zakat merupakan Rukun Islam yang wajib dilaksanakan sebagai seorang muslim yang memiliki harta lebih, yang manfaat dari zakat itu tidak hanya bernilai ibadah namun juga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi delapan golongan yang berhak menerimanya atau biasa disebut dengan delapan asnaf.

Berdasarkan surat *At-Taubah*, delapan golongan orang dalam Islam yang berhak menerima zakat di antaranya adalah:

1. Fakir

Seseorang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan, tidak mempunyai apapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Miskin

Seseorang yang memiliki harta dan penghasilan, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok untuk sehari-hari.

3. Mualaf

Seseorang yang baru masuk agama Islam.

4. Hamba Sahaya atau *Riqab*.

Seseorang yang terjerat tidak memiliki kebebasan dan ingin memerdekakan dirinya.

5. *Gharim*.

Seseorang yang berhutang karena untuk memenuhi kebutuhan hidup dan jiwanya.

6. *Fii Sabilillah.*

Seseorang yang berjuang di jalan Allah SWT bisa dalam bentuk jihad, berdakwah dan sebagainya.

7. *Ibnu Sabil*

Seseorang yang kehabisan dana ketika diperjalanan dalam ketaatan kepada Allah SWT.

8. Amil Zakat

Seseorang yang mengumpulkan zakat kemudian menyalurkannya kepada 7 golongan yang berhak menerima agar mereka dapat memanfaatkannya (Baznas, 2019).

Islam mengajarkan selain delapan golongan yang berhak mendapat zakat, terdapat juga golongan yang berhak untuk dibantu dan diberdayakan kehidupan yaitu kaum duafa. Kaum duafa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan orang-orang yang lemah secara ekonomi dan sebagainya (Dikutip dari kbbi.web.id). Kaum duafa merupakan golongan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan, ketakberdayaan, kelemahan secara terus menerus. Fakir miskin, orang cacat, dan anak yatim termasuk dalam golongan kaum duafa. Kaum ini perlu disantuni bisa dengan diberikan barang atau dana yang bermanfaat untuk mencukupi hidupnya (Dikutip dari amalia.or.id).